



**SUARA
PASURUAN**

■ KREATIF
■ DINAMIS
■ ASPIRATIF

BerAKHLAK
Berakhlak, Berprestasi, Berkeadilan, Berkeadilan

**#bangga
melayani
bangsa**

Cegah Penyelewangan Keuangan Dana Desa, Kejaksanaan Teken MoU dengan 341 Kades se-Kabupaten Pasuruan



Kamis, 12 Maret 2020

Kejaksanaan Negeri Kabupaten Pasuruan menandatangani nota kesepakatan dengan 341 kepala desa di Kabupaten Pasuruan untuk mencegah penyelewengan dana desa. Penandatanganan ini dilakukan di Pendopo Kabupaten Pasuruan pada Kamis (12/03/2020), disaksikan oleh Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf, dan pejabat terkait lainnya. Bupati Irsyad menyambut baik kerjasama ini dan berharap nota kesepakatan ini dapat memberikan panduan dan dukungan bagi para kepala

desa dalam mengelola dana desa secara transparan dan bertanggung jawab.

MoU ini diinisiasi oleh Kejari Kabupaten Pasuruan sebagai bentuk dukungan terhadap pengelolaan dana desa yang transparan dan sesuai peraturan perundang-undangan. Bupati Irsyad menekankan pentingnya pencegahan penyimpangan dana desa, mengingat masih terdapat ketidakpahaman dan kendala dalam pengelolaan keuangan di desa. Ia juga menyoroti potensi permasalahan dari pihak eksternal, seperti aksi premanisme, yang dapat menghambat pengelolaan dana desa.

Kejari Kabupaten Pasuruan, Ramdhanu Dwiyanoro, menyatakan kesiapannya memberikan konsultasi gratis kepada para kepala desa terkait pengelolaan dana desa. Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa, serta menghimbau agar kepala desa tidak melakukan kegiatan fiktif. Kejari Pasuruan akan melakukan audit terhadap penggunaan dana desa untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan.

Dalam sambutannya, Bupati Irsyad juga menyampaikan apresiasinya atas inisiatif Kejari dalam membantu para kepala desa. Ia berharap kerjasama ini dapat meningkatkan kapasitas para kepala desa dalam mengelola keuangan desa, sehingga dapat meminimalisir potensi penyelewengan

dana desa.

Dengan adanya MoU ini, diharapkan dapat tercipta sinergi yang kuat antara Kejari dan para kepala desa dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana desa yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.

